

# STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM MILENIAL BERBASIS LK

## PENDAHULUAN

Makalah disusun bagi keperluan KPAP untuk bahan pertimbangan dalam mengajukan rekomendasi konstruktif kepada pemerintah dan berbagai pihak yang peduli pembangunan industri UMKM NKRI. Makalah bukan rahasia, sehingga disajikan kepada sidang pembaca, agar membantu upaya mulia tersebut.

## USULAN STRATEGIS

Agar memudahkan, pemikiran strategis disusun secara *historiografis* dan bertata nomor, bermuara pada Strategi NKRI untuk pemberdayaan UMKM berbasis LK Audit, sebagai berikut.

### 1. PANORAMA INDUSTRI UMKM

Setiap tahun terjadi arus masuk dunia kerja dan dunia UMKM sebesar 3 juta pencari nafkah baru adalah generasi paska-generasi-milenial atau generasi-digital-paripurna, masuk dalam pasar tenaga kerja atau menjadi wirausaha. Pelaku UMKM yang telah memanfaatkan teknologi dewasa ini hanya sebesar 8 juta orang, namun tumbuh dalam kecepatan tinggi dari tahun ketahun. Pemerintah terus berupaya menyediakan ekosistem usaha yang kondusif untuk menembangkan bisnis para milenial. Laporan Keuangan adalah komoditas berbisnis bagi UMKM, menjadi makin mungkin karena (1) Sebagian besar transaksi bisnis tak menggunakan uang-kartal, (2) sistem akuntansi makin bersifat digital, kini berkembang berbasis gadget umumnya, telepon genggam khususnya, lebih khusus lagi berbasis Android, (3) software akuntansi UMKM sebagian tersedia gratis, (4) bank/kreditur membutuhkan informasi keuangan terhubung secara realtime dengan catatan akuntansi UMKM, (5) KAP/AP cq auditor LK UMKM dapat melakukan audit LK berbasis program audit yang terhubung secara elektronik kepada catatan-akuntansi-elektronik UMKM. Biaya audit

amat ringan, namun jumlah klien audit skala UMKM berjumlah amat banyak pada tiap KAP Peduli UMKM. Pada panorama tersebut di atas, KPAP bersama IAPI diharapkan membuat cetak biru pemberdayaan UMKM dan perbankan mikro berbasis LK UMKM atau bahkan berbasis LK Auditan UMKM. Bagi 64 juta unit UMKM dengan sekitar 5 juta UMKM Berplatform digital, jumlah kredit nasional bagi UKM baru mencapai Rp.1.100 Triliun masih amat kecil, sehingga perlu diupayakan diperbesar dengan hampiran kredit nir-agun berbasis LK.

No	Ukuran Usaha	Aset tidak termasuk tanah dan bangunan	Omzet (per tahun)
1	Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
2	Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 juta – Rp 500 juta	Lebih dari Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar
3	Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 juta – Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar
4	Usaha Besar	Lebih dari Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 50 miliar

No	Tahun	Jumlah UMKM (unit usaha)	Dominasi (%)
1	2010	52,764.750	99%
2	2011	54.114.821	99%
3	2012	55.206.444	99%
4	2013	56.534.592	99%
5	2014	57.895.721	99%
6	2015	59.262.772	99%
7	2016	61.651.177	99%
8	2017	62.922.617	99%
9	2018	64.194.057	99%

UMKM menyumbang 62,57 % PDB tahun 2016, dewasa ini berjumlah 56,54 juta unit usaha atau 99,99 % seluruh unit usaha di Indonesia, dewasa ini dilanda Revolusi Industri 4.0 melanda UMKKM. Ketua KEIN, Soetrisno Bachir mengatakan era industri 4.0 menuntut pelaku UMKM harus memahami dan menguasai digitalisasi bisnisnya agar mampu beroperasi secara efektif dan efisien. Pada bulan Maret 2021, sekitar 5 juta UMKM berplatform digital, merupakan target makalah ini.

Terdapat berbagai BUMN peduli UMKM, menciptakan aplikasi bagi pelaku usaha pertanian. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani mengatakan, sekitar 30 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpaksa harus menutup usahanya untuk sementara waktu karena pandemi Covid-19. Menurut BPS (2018), jumlah UMKM yang ada di Indonesia sendiri berjumlah 64,2 juta unit, menurut Survei ADB (*Asian Development Bank*), pada Juli 2020, hampir 50 persen (48,6 persen) dari total UMKM sudah menutup usaha. 30 persen UMKM lainnya mengalami gangguan permintaan domestik, sebanyak 20 persen mengalami gangguan produksi, dan 14,1 persen mengalami pembatalan kontrak. Restrukturisasi kredit perbankan kurang lebih Rp 555 triliun dari total *lending* perbankan terhadap UMKM sebesar Rp 1.100 triliun, realisasi UMKM telah direstrukturisasi kurang lebih Rp 317,29 triliun.

## **2. DIGITALISASI PERIZINAN**

Kadin-Pemerintah sepakat mengembangkan UMKM Pangan dan Pariwisata. Digitalisasi mencakupi perizinan elektronis bagi UMKM, menyambut keluhan Presiden dalam berbagai kesempatan sering menyinggung soal lama pengurusan perijinan. Presiden menyatakan bahwa di luar negeri, pengurusan perizinan cukup membutuhkan hitungan hari, bahkan cukup dengan hitungan jam, tapi di Indonesia memakan waktu berminggu-minggu, lama dan ‘mahal’.

Kadin menyatakan bahwa UMKM adalah tumpuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. Kadin Indonesia meminta Pemerintah mengambil langkah ekstrim untuk membantu mengembangkan UMKM. Pemerintah harus mengambil langkah khusus bahkan ekstrem untuk membantu

berkembangnya UMKM. Pelaku dan calon pelaku UMKM harus diberikan karpet merah.

Sekarang telah ada *digitalisasi pembuatan Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)* misalnya, tapi alamat domisili usahanya harus sesuai dengan KTP dan KK, bahkan masih diperlukan surat pengantar RT dan RW setempat, harus disimplifikasi. Pelaku yang ingin mengurus izin tidak perlu berkeliling ke RT dan RW satu persatu," tambahnya.

Upaya Digitalisasi Pasar Tradisional berbasis Sekolah Pasar dan pendampingan UMKM baru dengan launching *belanja online* ini sekaligus *opening web* pasar BRI, sekolah pasar dan expo UMKM. Masyarakat mengetahui cara pemesanan online tidak perlu lagi datang, Di sekolah pasar ini pedagang diajari dan dilatih bagaimana caranya berjualan secara efektif melalui *media online*.

Seluruh bantuan keuangan bagi UMKM berbasis digital. Sebagai contoh; Terdapat BLT berbasis aplikasi bagi UMKM Milenial, terunggah sebagai artikel Cara Daftar UMKM E form BRI Login [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) Daftar UMKM Online E Form BRI Co Id BPUM.

### **3. PROGRAM DIGITALISASI UMKM VERSI PEMERINTAH**

Program Digitalisasi UMKM versi Kementerian Koperasi & UKM. Program sinergi tersebut antara lain Gerakan Belanja di Warung Tetangga. Itu merupakan kolaborasi KemenkopUKM dengan sembilan BUMN Klaster Pangan, Bulog, dan PTPN yang menghubungkan warung tradisional untuk masuk ke dalam platform daring serta menyediakan stok bahan baku yang mudah dengan harga yang kompetitif, sehingga UMKM dapat bersaing dengan ritel modern. Strategi digitalisasi percepatan kebangkitan UMKM dengan menggulirkan program peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, program Kelas Daring melalui [edukukm.id](http://edukukm.id), Sparc Campus, paket Pahlawan Digital UMKM, komunitas ber aplikasi lokal seperti Pasar Gotong Royong Indonesia Creative Store, digitalisasi UMKM agar Onboarding melalui program Kakak Asuh dan UMKM Katalog Digital (IMOOJI), aktivitas promosi dan pemasaran dengan billboard untuk *local brand activist* dan *#banggabuatanindonesia*, promosi

produk oleh PLUT KUMKM, review produk oleh influencer, artis dan musisi. Saat ini baru 13% dari total 63 juta pelaku UMKM yang telah masuk ke dalam ekosistem digital. Digitalisasi UMKM harus menjadi agenda kolektif, melalui edukasi lalu inkubasi bagi UMKM agar terhubung dengan ekosistem digital. Dalam hal ini kita tidak dapat bekerja sendiri dalam mengakomodasi kebutuhan transformasi digital bagi UMKM, perlu sinergi, kolaborasi sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk mencapai target dua juta UMKM Go Online di tahun 2020.

#### **4. PERBANKAN UMKM**

Presiden Mendorong Dukungan Perbankan bagi UMKM karena UMKM yang menikmati dana perbankan dengan kebijakannya, baru sekitar 12 persen dari jumlah UMKM Indonesia, selebihnya pembiayaan UMKM berasal dari lintah darat. Aplikasi *sharing economy* sedang berlangsung. Di pulau Bali, sebuah koperasi mulai menjajaki modus itu. KSP TEB Artha Mulia yang berdiri pada 2014, telah terhubung (*interconnected*) berbasis Android dengan sebelas koperasi lain di sana. Hasilnya sangat menggembirakan, jumlah anggota koperasi dan aset koperasi meningkat tajam.

Layanan Konsultasi Hukum secara Digital ditawarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM), yang bekerja sama dengan Hukumonline Group dalam menyediakan layanan konsultasi hukum gratis bagi pelaku koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), terutama bidang usaha terdampak pandemi, melalui platform digital yang disediakan oleh Justika.com. Rencana kerja sama ini akan dilanjutkan untuk pemberian konsultasi hukum dalam bentuk konsultasi melalui telepon, serta konsultasi dan layanan perizinan melalui Easybiz, apabila pelaku Koperasi dan UMKM membutuhkannya.



## **5. UMKM EKSPORTIR**

Kadin membangun UMKM Eksportir sejalan dengan pemerintah NKRI yang sedang gencar melakukan perdagangan internasional dengan Australia seperti RCIP dan CEPA, melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang ada di sektor UMKM, adopsi teknologi pemasaran dan pengenalan sektor formal di finansial untuk berbagai produk berbasis pertanian, perikanan, furnitur, home decor, kosmetik, herbal *product*, fashion, dan buah segar, menyambut baik Program Kolaborasi Akselerasi Mencetak 500 ribu Eksportir Baru di 2030. Program ini dapat mendorong kontribusi usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kepada ekspor yang saat ini masih di sekitar 15 persen.

## **6. AKUNTANSI DAN LK UMKM**

Akuntansi Sederhana dan LK UMKM adalah tulang punggung UMKM nan sehat. Makalah "*Accounting for UMKM*" disajikan Nur Fadhila Amri, SE., M.Si (2018) menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. Praktik akuntansi, khususnya akuntansi keuangan pada UMKM di Indonesia masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Wahdini & Suhairi, 2006). Kelemahan itu, antara lain disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

dari manajer pemilik dan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. Sudarini dalam Wahdini & Suhairi 2006 juga membuktikan bahwa perusahaan kecil di Indonesia cenderung untuk memilih norma perhitungan (tanpa menyusun LK) sebagai dasar perhitungan pajak, karena, biaya yang dikeluarkan untuk menyusun laporan keuangan jauh lebih besar daripada kelebihan pajak yang harus dibayar. Studi terhadap penerapan SAK memberikan bukti bahwa Standar Akuntansi yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan *overload* (memberatkan) bagi pelaku UKM (Wahdini & Suhairi, 2006), walau semua tahu bahwa dengan akuntansi & LK yang memadai, pengusaha UMKM lebih mampu memenuhi persyaratan kredit bank. Pengajuan kredit dilengkapi laporan keuangan, menyebabkan bank dapat mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak dan manfaat lainnya (Warsono, 2010). Pengusaha UMKM Mlienia tak perlu faham SAK EMKM buatan IAI, karena berbagai *software* aplikasi akuntansi “tinggal pakai” sudah dirancang sesuai SAK EMKM, sebagian dapat diunduh cuma-cuma lewat *playstore* atau situs penyedia aplikasi. Sebagai proyek nasional, KPAP menghimbau agar APBN, atau OJK, atau BRI menyediakan anggaran penciptaan perangkat lunak akuntansi UMKM berbasis telepon genggam.

## 7. PEMBANGUNAN *BLOCK CHAIN* UMKM

Pembangunan Ekonomi Jaringan ( *Block Chain* ) pada Milenial Economics. UMKM menghadapi masalah tentang membangun profil bisnis digital dan *credit scoring*, karena itu UMKM perlu dijembatani untuk mendapatkan akses ke institusi finansial, perbankan, supplier, dan lainnya dengan teknologi blockchain. Dalam sebuah ekonomi jaringan (*network economy*), bank perkreditan UKM, jaringan bahan baku dan jaringan outlet merupakan jaringan pendukung perekonomian bertulang punggung UMKM. Tiap entitas UMKM memiliki sekelompok pemasok bahan/input, sekelompok pasar/pelanggan, sekelompok pekerja pada UMKM, dan sekelompok jasa keuangan. *Supply chain sebuah unit usaha* dewasa ini berbasis sebuah jaringan maya (*virtual network*). Danang Sugianto (2019), unggahan detik Finance, memberitakan hal ikhwal blockchain sebagai platform UMKM, pada artikel berjudul Kadin Bantu UMKM Lewat Blockchain, sebagai berikut. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani beberapa kerja sama dalam acara Global Blockchain Investment Summit (GBIS). Salah satunya dengan penyedia blockchain di Indonesia,

Tokoin, dalam rangka penyediaan pembiayaan dagang UMKM berbasis blockchain. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan kerjasama resmi (MoU) Tokoin dan Kadin di depan sekitar 3 ribu peserta GBIS 2019.

## **8. APLIKASI AKUNTANSI UMKM**

Aplikasi UMKM-Mu pada Playstore & Dukungan OJK serta Kadin. OJK dan Kadin peduli pengembangan *UKM Milenia berbasis aplikasi UMKM unduhan dari Play Store* dan melakukan berbagai kegiatan di seluruh Nusantara. Angga Rosa (2021) mengunggah artikel berjudul OJK Fasilitasi Business Matching Klaster UMKM 17 Kabupaten di Jateng, menjelaskan sebagai berikut. Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kantor OJK Regional 3) melakukan *business matching klaster* UMKM di 17 Kabupaten se-Jawa Tengah. Industri Jasa Keuangan terus meningkatkan upaya-upaya pengembangan UMKM. Sinergi bersama pemerintah dan Industri Jasa Keuangan di Jawa Tengah harus dapat menularkan virus pemberdayaan klaster UMKM ke daerah lain. Selain program *business matching*, OJK Regional 3 bersama Kantor OJK di wilayah Jawa Tengah dan DIY juga memberikan dukungan maksimal dalam perluasan akses pasar secara digital melalui platform market place UMKM-MU. Saat ini sudah ada 400 produk UMKM Jawa Tengah dan DIY yang dipasarkan melalui UMKM-Mu. Masyarakat dapat mengunduh aplikasi UMKM-Mu melalui Play Store

## **9. PEMBANGUNAN PENGUSAHA MILENIAL**

Pemerintah Daerah dan Kadin Daerah Peduli Milenialpreneur. Artikel unggahan Serambi News.Com (2021) berjudul Hadiri Bazar Milennial Preneur Kadin Aceh Besar, Ketua DPRK Komit Bangkitkan UMKM menjelaskan kepedulian pemerintah akan UMKM Milenial.

## **10. SUMBANGAN PENDAPATAN NEGARA BERBENTUK PAJAK**

Sumbangan Pajak UKM bagi APBN dan PDB cukup besar. KPAP bersama Kadin UMKM, bank perkreditan rakyat dalam industri perbankan nasional dapat mendorong pemerintah agar memberi kemudahan perpajakan bagi UMKM yang mampu

berakuntansi dan ber LK, misalnya keringanan tarif pajak bagi SPT WP UMKM berbasis LK, keringanan tarif kredit bagi UMKM bersertifikat Trampil Akuntansi . Artikel berjudul Pajak Dan UMKM diunggah Binus University (2014) sebagai berikut. Meski UMKM berperan dominan terhadap perekonomian nasional, apabila dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, terlihat bahwa kepatuhan pajak UMKM masih belum memadai. Meski jumlah UMKM di atas 50 juta unit, jumlah pembayar pajak “orang pribadi” yang memiliki NPWP masih sekitar 20 juta. Mengapa tingkat kepatuhan pajak tersebut masih rendah? Jawabnya adalah bahwa UMKM dimulai dari usaha perorangan, yang jika berkembang, berbentuk badan dengan skala kecil menengah, beban administrasi pajak yang kompleks akan meningkatkan biaya kepatuhan pajak yang dapat menurunkan daya saing UMKM, berdampak terhadap tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Tarif pajak yang tidak kompetitif bagi pembayar pajak UMKM untuk berkompetisi dengan non-UMKM. Jika tarif pajak terlalu tinggi, misalnya total PPN dan PPh 11 persen, dengan tingkat keuntungan yang sama atau lebih rendah, maka usaha UMKM tak feasible. Perpajakan atas UKM terdiri atas dua jenis pajak utama yang memiliki peran signifikan, yaitu PPh dan PPN, dengan PPh sebagai pajak dominan. Berdasarkan PP No 46/2013, wajib pajak dengan peredaran usaha di bawah Rp 4,8 miliar dikenakan PPh 1 persen dari total peredaran usaha dan bersifat final. Pelaku UMKM tak harus menghitung secara tepat berapa keuntungan yang dihasilkan karena pajak tersebut bersifat final sehingga tidak dipengaruhi oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan. Ini berarti pembayar pajak di sektor ini dipermudah, baik dari segi administrasi maupun tarif yang kompetitif. Namun, PPN masih jadi kendala mengingat kewajiban sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dengan peredaran usaha di atas Rp 600 juta.

Apabila merujuk peraturan yang berlaku, yakni UMKM dengan peredaran di bawah Rp 4,8 miliar wajib memungut PPN 10 persen, bagi UMKM hal ini jadi masalah besar. Di penghujung 2013, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197 yang mulai berlaku pada awal 2014 meningkatkan batasan wajib PKP jadi Rp 4.8 miliar per tahun. Hal ini bagaikan memberi angin segar dengan semakin memberi kemudahan bagi pelaku usaha di sektor ini, yang berarti bagi UMKM pajak utama yang jadi beban dalam komponen penghitungan laba UMKM, adalah PPh 1 persen. Terkait kebijakan dalam PP No 46/2013 dan PMK No 197/2013, tidak saja membawa angin segar bagi pelaku UMKM dengan tarif yang kompetitif, tetapi juga kesederhanaan

dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pajak tahunan. Karena itu, kombinasi tentang PPh 1 persen dan peningkatan batasan untuk jadi PKP adalah solusi yang selaras menunjang tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemerintah nan mulia berupaya meningkatkan daya saing UMKM, yang akan berbalik menunjang perekonomian nasional. Sebagai motor penggerak ekonomi nasional, pemerintah memberikan berbagai bantuan kepada UMKM, agar dapat bertahan dan bangkit pada masa pandemi ini. Dari total biaya yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020 sebesar Rp695,2 triliun, sebesar Rp123,46 triliun (atau 17,75%) dialokasikan khusus untuk mendukung UMKM. Bantuan fiskal untuk UMKM dialokasikan untuk enam kegiatan, yakni subsidi bunga sebesar Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp5 triliun, PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp2,4 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar Rp1 triliun rupiah (Kompas, 2 September 2020). Jenis Bantuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM adalah Subsidi Bunga 35,28 triliun, Penempatan Dana untuk Restrukturisasi Kredit 78,78 triliun, Belanja Imbal Jasa Penjaminan 5 triliun, Penjaminan untuk Modal Kerja 1 triliun, PPh Final Ditanggung Pemerintah 2,4 triliun, Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB 1 triliun, seluruhnya berjumlah 123,47 triliun. Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK-44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- 1) Tarif 0,5% yang diatur oleh PP 23/2018 diperuntukkan bagi UMKM dengan peredaran bruto selama setahun tidak lebih dari Rp4,8 miliar.
- 2) Subjeknya adalah orang pribadi, badan usaha berbentuk PT, CV, Firma, dan koperasi.
- 3) Dengan ketentuan tersebut, PPh final 0,5% untuk pelaku UMKM ditanggung pemerintah (DTP) atau dibebaskan.
- 4) Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada

pelaku UMKM. Insentif ini diberikan untuk masa pajak April hingga September 2020.

- 5) Pengajuan permohonan insentif dapat dilakukan secara online melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id), 22 Juni 2020).
- 6) Restrukturisasi kredit UMKM juga dilakukan dengan penundaan pokok dan subsidi. Kebijakan ini mendapatkan payung hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang kemudian diperbaharui dengan Nomor 85/PMK.05/2020.

Kebijakan bagi UMKM juga dilakukan melalui penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha mikro dan kecil (kredit s/d. Rp500 juta) melalui BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan, maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan kedua.

Di samping itu diberikan penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha menengah (kredit Rp500 juta sampai Rp10 miliar) melalui BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan sebesar 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan kedua.

Kriteria UMKM yang dapat memperoleh subsidi bunga/margin, antara lain: (1) Memiliki plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000; (2) Memiliki sisa pokok (baki debet) kredit/pembiayaan sebelum masa pandemi Covid-19 (terdapat baki debet sampai dengan 29 Februari 2020); (3) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional; (4) Memiliki kategori performing loanlancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan (5) Memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP ([kompaspedia.kompas.id](http://kompaspedia.kompas.id), 31 Agustus 2020).



Kebijakan modal kerja yang pertama dilakukan adalah pemberian kredit modal kerja berbunga murah melalui penempatan uang negara dalam bentuk deposito dan/atau giro pemerintah pada bank umum mitra. Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp30 triliun rupiah pada bank umum mitra selama 6 bulan.

Penempatan dana pemerintah ini dilakukan untuk mempercepat pemberian kredit, khususnya untuk UMKM dan industri padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi masyarakat kelas bawah.

## **11. SISTEM AKUNTANSI UMKM**

LK UMKM berbasis Sistem Akuntansi UKM. Binus University (2020) mengunggah makalah berjudul Sistem Informasi Akuntansi untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan sistem informasi akuntansi: Sistem informasi akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip cepat yaitu sistem informasi akuntansi harus menyediakan informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat waktu serta dapat memenuhi kebutuhan dan kualitas yang sesuai, aman yaitu sistem informasi harus dapat

membantu menjaga keamanan harta milik perusahaan dan murah yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi akuntansi tersebut harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal, ditemukan oleh studi KPAP ini berupa software akuntansi sederhana terpasang pada gadget pelaku usaha UMKM Digital.

Apabila UMKM tersebar pada berbagai pulau Jawa dan luar Jawa, maka KPAP memandang perlu penyebaran KAP Milenial ber ukuran kecil dan menengah di luar pulau Jawa. Tentang Perangkat Lunak Audit LK UMKM, KPAP bersama IAPI dapat mendorong pembuatan perangkat lunak audit LK UMKM, atau mengambil lisensi program audit ber merek dari daftar di bawah ini. Sumber rujukan studi KPAP adalah sebuah lembaga bernama Small Business Software Reviews, Services Insight and Resources menerbitkan iklan berjudul “Best Audit Software For Small Business”.

## **12. PELATIHAN AUDITOR UMKM**

Penyeragaman penggunaan aplikasi audit LK UKM dan pelatihan audit LK anggota IAPI.

- a. Perangkat lunak program audit EMKM resmi IAPI.
  - a.1. Perangkat lunak audit LK Umum.
  - a.2. Berbagai perangkat lunak audit industri khusus.
- b. Manual atau Panduan Audit UKM, due process yang berterima PPPK dan BPK.
- c. Contoh kertas kerja elektronik untuk audit LK UMKM yang Disederhanakan.

Strategi membangun kesadaran berakuntansi berupa promosi keuntungan berakuntansi dan ber LK bagi UMKM. Makalah Lusinah (2020), Binus University menjelaskan Pentingnya Aplikasi Akuntansi bagi UMKM, sebagai berikut. Perkembangan UMKM di Indonesia berkembang semakin pesat, sehingga membuat persaingan menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, para pelaku usaha perlu membekali kemampuan mereka dalam mengelola usaha dengan teknologi. Salah satu teknologi yang dapat diterapkan adalah penggunaan software accounting, dimana ini dapat mempercepat dan memudahkan penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan usahanya. Kesalahan dalam pengelolaan laporan keuangan sering kali menjadi penyebab UMKM mengalami gulung tikar, karena terkadang kesalahan yang terjadi

memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keseluruhan bisnis. Kesalahan tersebut dapat diatasi, salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan software accounting.

Berdasarkan pertimbangan di atas, berikut ini adalah alasan pentingnya penggunaan software accounting bagi UMKM:

1) Perhitungan laba yang jelas

Perhitungan laba merupakan bagian yang menentukan bagaimana kinerja dari sebuah UMKM. Perhitungan laba perusahaan ini tidak bisa dilakukan dengan asal, software akuntansi bisa mencatat setiap data transaksi dan mengakumulasi data tersebut sehingga perhitungan laba menjadi lebih jelas.

2) Pencatatan transaksi UMKM

Setiap transaksi yang terjadi perlu dihitung dan dicatat dengan tepat. Software akuntansi memiliki fitur yang bisa digunakan untuk mencatat setiap transaksi UMKM secara tepat, akurat, dan melakukan penghitungan akumulasi secara otomatis.

3) Laporan keuangan UMKM

Software accounting dilengkapi dengan sistem perhitungan dan penyusunan laporan keuangan yang akurat. Sehingga bisa mengurangi kesalahan perhitungan yang biasa dilakukan secara manual.

4) Menghemat biaya

Dengan menggunakan software accounting, UMKM tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa jasa akuntan untuk menyelesaikan urusan keuangan.

### **13. PERANGKAT LUNAK AKUNTANSI GRATIS**

Aplikasi Akuntansi pada HP banyak tersedia di pasar bebas, sebagian dapat diperoleh Cuma-cuma. PT Morando Berlian Sakti menawarkan Harmony adalah software akuntansi online berbasis HP yang memudahkan bisnis UMKM. Harmony mampu memonitor kondisi toko yang tempat yang berbeda jauh karena interface dapat di

gabungkan, cocok sekali untuk pengusaha yang memiliki beberapa cabang. Operasi akuntansi dan rekonsiliasi saldo bank lebih cepat, mudah, dan efisien”.

#### **14. AKUNTANSI BERBASIS ANDROID**

Pada Triwulan pertama 2021, terdapat hanya sekitar 5 juta UMKM berplatform digital di NKRI. Bagi sebagian pengusaha UMKM, laptop tetap saja adalah kemewahan dan ribet kalau di bawa-bawa berbisnis. Sistem Akuntansi Berbasis Android terungkap pada kajian Irena Paramita, Asri Suangga, Riyang Mardiani, Jefrieny Ilhamsyah tentang Akuntansi UKM berbasis Android, berlatar belakang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan usaha yang menjadi penopang utama perekonomian di Indonesia, antara lain menjelaskan bahwa menjelang periode Revolusi Industri 4.0. dimana tren otomasi terjadi pada semua bidang, bidang akuntansi dan UMKM merupakan salah satu bidang yang terkena dampak signifikan dari perkembangan teknologi saat ini. Kemudahan di era digital menjadi sebuah potensi bagi UMKM untuk lebih berkembang, baik dari segi perluasan pangsa pasar, kemudahan bertransaksi keuangan maupun kemudahan untuk mencatat transaksi keuangan secara digital. Pada tahun 2018, tercatat lebih dari 54% penduduk Indonesia telah terkoneksi dan menggunakan internet menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2018). Penggunaan handphone di masyarakat juga sangat tinggi, tercatat sebanyak 371,4 juta ponsel terdaftar atau 142% dari total populasi (databooks, t.thn). Aplikasi akuntansi berbasis Android merupakan salah satu penerapan teknologi yang memiliki potensi untuk mengintermediasi kesulitan dari UMKM dan kebutuhan dari berbagai pihak terkait penyediaan laporan keuangan UMKM yang berkualitas, relevan dan andal. Namun dengan banyaknya aplikasi akuntansi lain yang beredar di masyarakat, dapat diperkirakan pelaku usaha yang boleh jadi tidak mengetahui seluk beluk proses akuntansi menjadi kewalahan dalam menentukan aplikasi akuntansi apa yang tepat bagi jenis usaha mereka.



## 15. PERANGKAT AKUNTANSI UMKM TERBAIK

Bagi UMKM Milenial, berbagai Perangkat lunak terbaik dunia untuk Akuntansi UKM diungkapkan sebagai iklan pada dunia maya. Terdapat beberapa perangkat lunak UMKM ternominasi sebagai perangkat akuntansi UMKM terbaik, mungkin di muka bumi. Rebecca Freedman, CPA (2020) menggunggah artikel berjudul The 5 Best Accounting Software for Small Business of 2021 menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. KPAP menyarankan belanja APBN, atau OJK, KADIN, Depkop & UMKM, Depkeu cq KPAP untuk perangkat lunak UMKM NKRI hendaknya mempertimbangkan klasifikasi terbaik tersebut yaitu QuickBooks Online (terbaik keseluruhan), Xero (cocok utk pemilik UMKM), FreshBooks yang baik untuk UMKM bidang jasa, QuickBooks untuk pengusaha sendirian atau part-time freelancers, terakhir adalah merek Wave sebagai perangkat lunak UKM berlalu umum. Terbaik adalah QuickBooks Online.

## 16. CARA SEDERHANA BERAKUNTANSI UMKM

Bagi pengusaha generasi milenial, Cara dan Contoh Membuat Laporan Keuangan Sederhana Untuk UMKM diiklankan oleh Accurate Online, sebagai sebuah *software* akuntansi berbasis *cloud* yang sudah digunakan lebih dari 300 ribu pengguna dari berbagai jenis bisnis di Indonesia mulai dari UMKM sampai perusahaan manufaktur besar. Hanya dengan 200 ribu rupiah perbulan Anda bisa mendapatkan semua kemudahan proses pembukuan yang Anda butuhkan dan otomatisasi pembuatan lebih dari 100 jenis laporan keuangan untuk usaha UMKM.

Setiap tahun terjadi arus masuk dunia kerja dan dunia UMKM sebesar 3 juta pencari nafkah baru, dalam pasar tenaga kerja. Pelaku UMKM yang telah memanfaatkan teknologi baru sebesar 8 juta orang, tumbuh dalam kecepatan tinggi. Pemerintah terus berupaya menyediakan ekosistem usaha yang kondusif untuk mengembangkan bisnis para milenial.

## **17. PEMBERDAYAAN TERPADU**

Pemberdayaan terpadu NKRI Baru bertulang punggung UMKM Milenial adalah dengan memecahkan persoalan kronis industri UMKM, yaitu bantuan pemerintah untuk menembus pasar lintas kepulauan dan pasar global, pemberdayaan UMKM terutama kemampuan pemasaran, kemampuan keuangan dan akuntansi, kemampuan teknologi, kemampuan perizinan usaha dan aspek legal lain, kemampuan manajemen sumber daya manusia.

Seluruh SLTA dan perguruan tinggi mempunyai mata-ajar atau mata-kuliah kewirausahaan. Seluruh mata ajar/kuliah di arahkan kepada manfaat praktis di dunia nyata. Aktivitas belajar-mengajar bukan sekadar untuk ijazah untuk mencari kerja. Perguruan menghapus etos keselamatan hidup dengan gaji berapapun, namun mendorong lulusan agar *self-employed*. Jurusan akuntansi di dorong agar berwirausaha apasaja dengan bekal ilmu akademi, antara lain menjadi produsen, pedagang, upa-duta-niaga (makelar), akuntan-publik, KJA, Konsultan Pajak dan mendirikan PT Konsultan Manajemen berspesialisasi pada sistem akuntansi, studi kelayakan, dan perpajakan. Seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemda mempunyai Satker yang bertugas membina UMKM, terutama membantu pendirian badan usaha berbentuk PT karena UUPT sengaja dirancang dengan modal awal sekecil mungkin, membantu perolehan izin usaha, izin sesuai UU Gangguan, kemudahan perolehan NPWP dan PKP, mendorong industri perbankan agar mencipta-kemudahan memperoleh fasilitas kredit. IAI, KPAP, IAPI, KADIN, Kementerian Sosial, Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian, berbagai BUMN dan Grup Usaha yang bereputasi peduli UMKM, bergotong-royong mencipta perangkat-lunak-akuntansi cuma-cuma bagi UMKM, ditambah pelatihan akuntansi & sertifikasi kemampuan membuat LK pra permohonan kredit. Depkop & Deperdag membantu dalam

peningkatan kemampuan pemasaran UMKM, Depnaker tentu saja membantu pelatihan manajemen sumber-daya manusia bagi UMKM, sehingga berpotensi memperbesar usahanya. Departemen Perindustrian membantu pengembangan penguasaan teknologi dasar bagi UMKM dengan berbagai pelatihan non-ijazah.

Desa-desa milenial adalah sebuah masyarakat berbasis pertanian dan IT, Presiden mencanangkan gerakan kembali ke desa, mendorong kebangkitan petani milenial berbasis pengetahuan dan teknologi pertanian, industri dan perdagangan modern, membangkitkan kebanggaan milenial sebagai produsen hasil-bumi. Makalah disusun bagi keperluan KPAP bersama IAPI dalam menggalang berbagai kekuatan nasional, agar LK UMKM Auditan menjadi tulang punggung industri perbankan berbasis UMKM, mengganti kredit berbasis agunan. Pembinaan UMKM dibantu oleh BUMN dan Grup Usaha peduli UMKM.

NKRI adalah sebuah negara berpenduduk Muslim tiga besar dimuka bumi, LK UMKM akan menyuburkan pembiayaan syariah umumnya, industri perbankan syariah khususnya. LK UMKM cq Laporan Laba/Rugi adalah syarat mutlak bagi sebuah perbankan berbasis bagi-hasil dan bagi risiko pada paket-paket kredit perbankan berbasis Mudarabah, Musyarakah dan semacamnya.

IAPI dan Cabang IAPI berpotensi menjadi pelatih seluruh perguruan tinggi NKRI yang membangun laboratorium praktik Kewirausahaan, Akuntansi dan Audit UMKM. Pengembangan KAP UMKM Milenial yang berukuran kecil, dalam desain KPAP bersama IAPI Peduli Pembangunan Ekonomi, akan tersebar di pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa, didirikan pada kantung-kantung industri-UMKM minimum pada 30 pulau terpilih dari 17.504 pulau NKRI, didirikan oleh lulusan Jurusan Akuntansi dengan berbagai kemudahan *perizinan-online* dari Depkeu, dengan pelatihan Audit UMKM oleh perguruan tinggi akuntansi dan IAPI berlambar *soft-ware* akuntansi UMKM dan *software* audit UMKM versi IAPI. Berbagai *software* akuntansi UMKM dan *software* audit LK UMKM juga tersedia gratis di dunia maya, mungkin dapat digunakan.

*Dr. Jan Hoesada, Ak., M.M., CPA., Perwakilan KSAP pada KPAP.  
Jakarta, 1 Juni 2021.*

*Dengan ingatan tulus kepada para pengusaha UMKM.*